

Rencana Strategis



01

Business Annual Report

02

Message from the CEO

03

A Year in Review

04

Government

05

Promotion



RENSTRA
BPKAD Kota Palangka Raya
2024-2026



BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.3.1. MAKSUD.....	5
1.3.2. TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KOTA PALANGKA RAYA 7	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	10
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	35
2.4.1. TANTANGAN	35
2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN SKPD	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 37	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD KOTA PALANGKA RAYA.....	37
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	39
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	43
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	50
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	62
4.1.1. Tujuan BPKAD Kota Palangka Raya.....	62
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah dari Kinerja BPKAD Kota Palangka Raya	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	68
6.1.1. PROGRAM	68
6.1.2. KEGIATAN	68
6.1.3. SUB KEGIATAN.....	69
6.1.4. INDIKATOR KINERJA.	94
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	95
PENUTUP	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

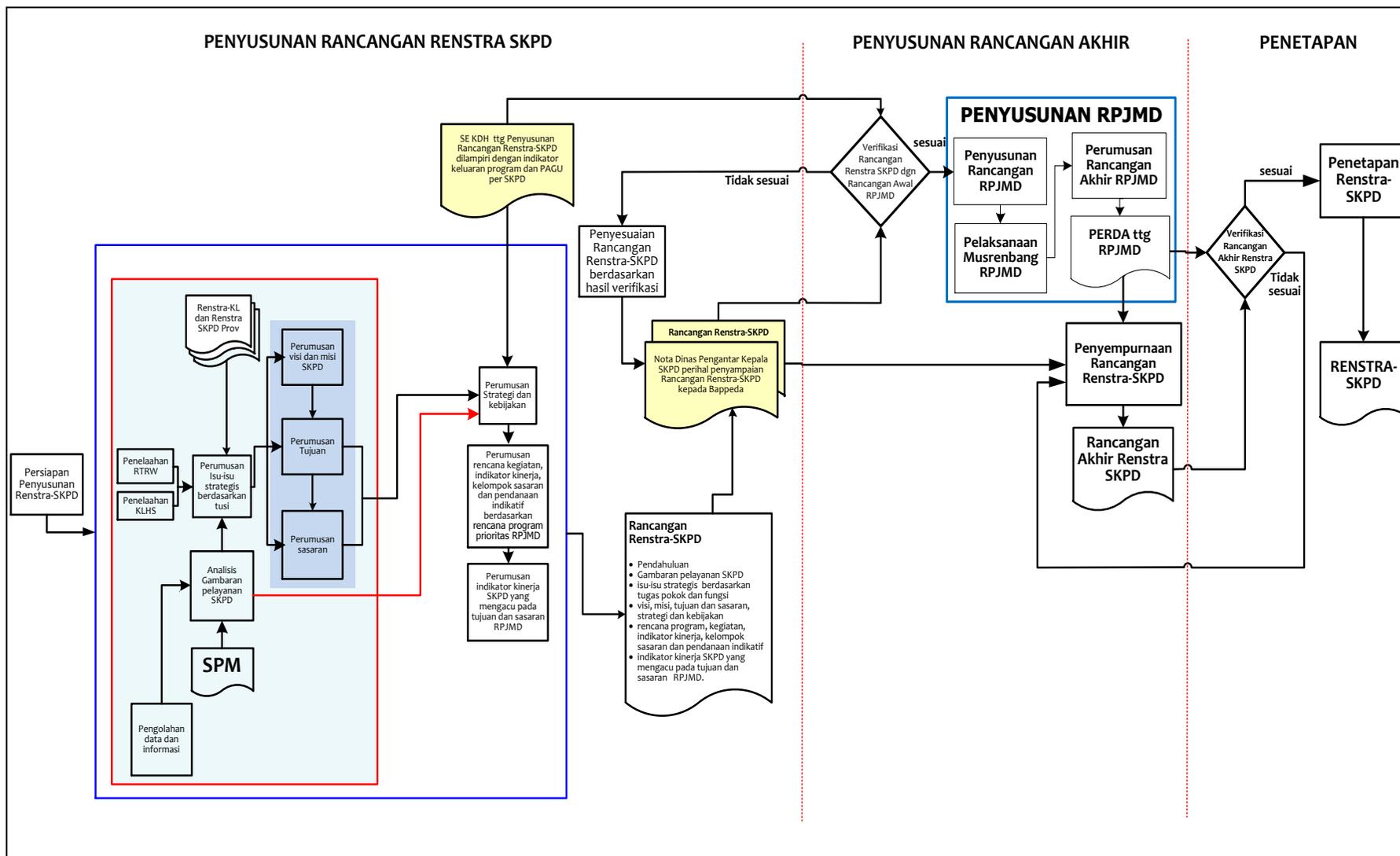
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Merupakan Dokumen Perencanaan yang Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024-2026 3 (tiga) Tahun dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkara mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu Renstra K/L Provinsi, Kabupaten/Kota kemudian akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Proses penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan Rancangan Awal Renstra dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan cascading, dan penyusunan dokumen rancangan awal Renstra; 2) Penyusunan rancangan Renstra; 3) Pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik; 4) Perumusan rancangan akhir Renstra; dan 5) Penetapan Perkada RPD. Penyusunan dokumen RPD dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renstra PD.

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 13 bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib, dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tujuan dan fungsi setiap perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Palangka Raya adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
12. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 , Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039

27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Fungsi dan Tata Kerja BPKAD
29. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kota Palangka Raya 2024-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya. untuk memberikan arah Kebijakan pembangunan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan strategis dalam penyusunan penganggaran Pengelolaan pembangunan Keuangan Daerah daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

1.3.2. TUJUAN

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya.
2. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BPKAD Kota Palangka Raya dalam kurun waktu tahun 2024-2026.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kota Palangka dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Memberikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.
5. Mewujudkan tata Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (*Renstra*) BPKAD Kota Palangka Raya telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan Penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
5.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
5.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
5.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
5.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KOTA PALANGKA RAYA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

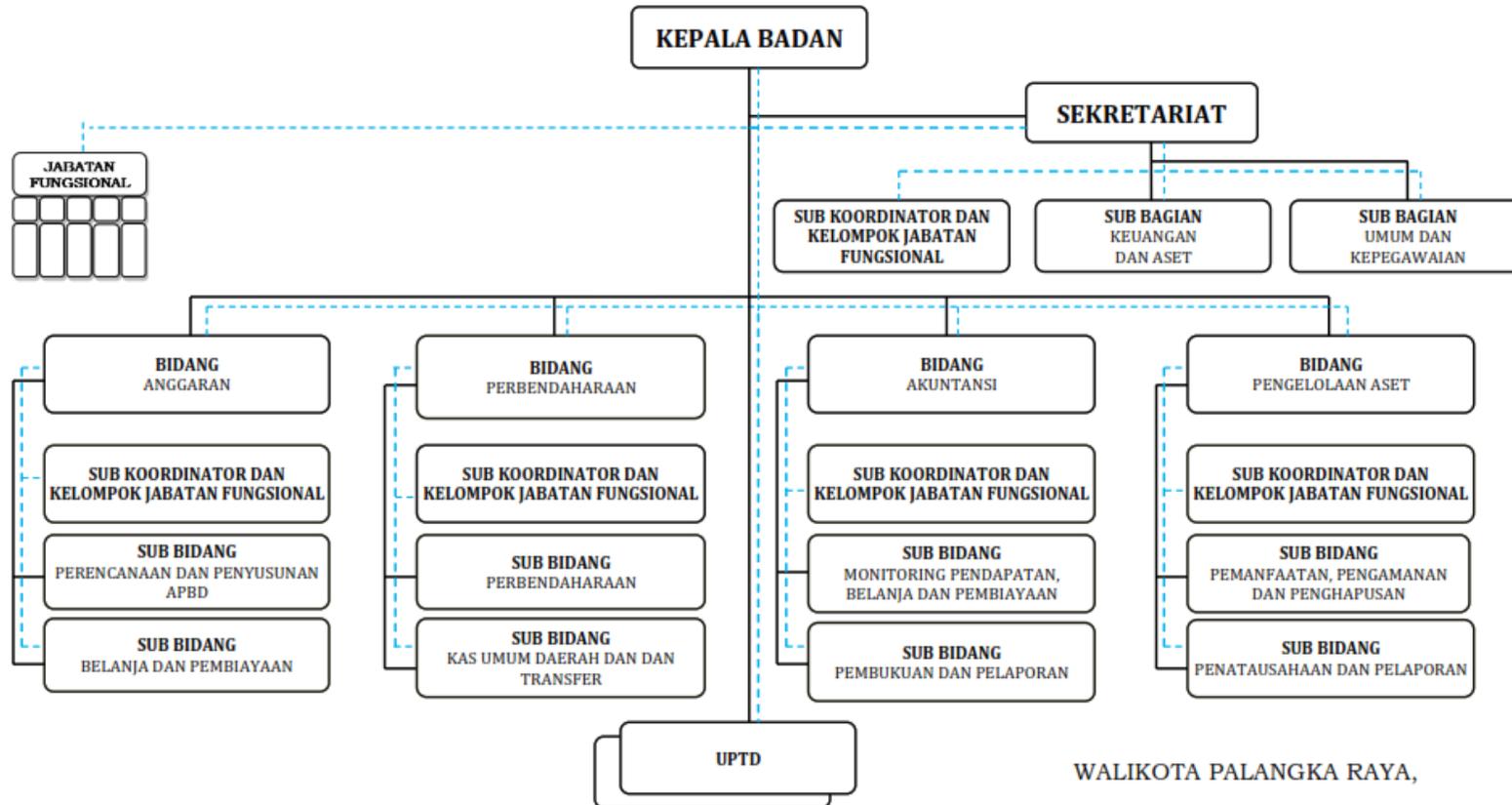
Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD; dan
 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Kas Umum Daerah dan Dana Transfer,
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Monitoring Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan; dan
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan Aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
 - d. membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar mencapai hasil yang optimal;
 - e. menyelenggarakan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan di sekretariat dan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya;
 - g. menyelenggarakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan membangun pola kemitraan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mendisposisikan dan memeriksa surat-surat masuk/keluar nota dinas, nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - k. menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
 PALANGKA RAYA

STRUKTUR PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



FAIRID NAPARIN

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya manusia

SDM merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. BPKAD Kota Palangka Raya memiliki sumberdaya manusia sebanyak 44 orang berdasarkan kualifikasi dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MUNTAHA S.E. LAKI-LAKI KOTAWARINGIN TIMUR, 27/08/1979	197908272023211006		IX	01/10/2023	JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/10/2023	0 Thn. 5 Bln.			S-1S-1 EKONOMI	2006	44 thn 6 bln
2.	HARIS FADILAH S.E. LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 11/08/1989	198908112023211023		IX	01/10/2023	JFT	AHLI PERTAMA - PERENCANA SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/10/2023	0 Thn. 5 Bln.			S-1S-1 EKONOMI	2014	34 thn 7 bln
3.	HERNANDO S.E LAKI-LAKI KAPUAS, 27/07/1993	199307272023211025		IX	01/10/2023	JFT	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/10/2023	0 Thn. 5 Bln.			S-1S-1 EKONOMI	2016	30 thn 7 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	NANANG NOOR ASLAM, S.E., M.A.P LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 13/12/1972	197212132000031006	12	IV/b	01/04/2020	III-A	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	28/04/2022	24 Thn. 0 Bln.	DIKLAT PIM III	2018	S-2MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (M.A.P	2011	51 thn 3 bln
5.	DWI PATMA SUSANTA, S.E LAKI-LAKI KLATEN, 02/08/1972	197208021998031005	11	IV/a	01/04/2022	III-B	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2021	26 Thn. 0 Bln.	DIKLAT PIM IV	2015	S-1EKONOMI AKUNTANSI	2005	51 thn 7 bln
6.	ANDRI PERMANA ST, MBA LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 20/12/1978	197812202010011007	14	IV/a	01/04/2022	II-B	KEPALA BADAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	23/09/2023	14 Thn. 2 Bln.	DIKLAT PIM III	2021	S-2MAGISTER MANAJEMEN	2008	45 thn 2 bln
6.	BAYA ASIE SE PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 18/09/1973	197309181993032003	9	III/d	01/04/2013	JFT	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	31/12/2021	31 Thn. 0 Bln.	DIKLAT PIM IV	2007	S-1S1	2002	50 thn 5 bln
7.	PRAFTI S.Sos PEREMPUAN Sungai Tewu, 03/09/1968	196809031988032004	10	III/d	01/10/2016	JFT	ANALIS KEBIJAKAN SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	31/12/2021	36 Thn. 0 Bln.	DIKLAT PIM IV	2017	S-1ILMU SOSIAL	2012	55 thn 6 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	KRISPRILNAL S.T LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 17/04/1987	198704172010011004	9	III/d	01/10/2020	IV-A	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	28/04/2022	14 Thn. 2 Bln.	DIKLAT PIM IV	2017	S-1S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2009	36 thn 10 bln
9.	DEWI MARLINE S.Sos PEREMPUAN KUALA KAPUAS, 12/08/1972	197203121993032010	7	III/d	01/04/2021	JFU	ANALIS SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	31 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	1993	S-1SOSIAL	2012	51 thn 7 bln
10.	FERIA WULAN SARI S.Pd PEREMPUAN SURABAYA, 28/02/1984	198402282009042006	7	III/d	01/10/2021	JFU	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2023	14 Thn. 11 Bln.	PRAJABATAN	2010	S-1S-1 PEND. BAHASA INGGRIS	2006	40 thn 0 bln
11.	LAMUS S.Sos PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 28/05/1968	196805281993082002	7	III/d	01/10/2021	JFU	ANALIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	30 Thn. 7 Bln.	PRAJABATAN	1994	S-1SOSIAL	2007	55 thn 9 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	YUANA A.Md PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 25/06/1975	197506251999022001	9	III/d	01/10/2021	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2021	25 Thn. 1 Bln.	DIKLAT PIM IV	2023	D-IIIMANAJEMEN	1997	48 thn 8 bln
14.	NOPERIANTIE S.E.,M.M PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 14/11/1986	198611142010012013	11	III/d	01/10/2021	III-B	KEPALA BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	23/09/2023	14 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-2MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2015	37 thn 4 bln
15.	YULIANA, S.E, M.Si PEREMPUAN SENGKANG, 24/04/1985	198504242010012011	7	III/d	01/04/2022	JFU	ANALIS PERBENDAHARAAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2023	14 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-2S-2 MANAJEMEN	2017	38 thn 10 bln
16.	ALPIANOR S.Hut., M.A.P LAKI-LAKI GUNUNG MAS, 21/09/1975	197509212010011004	11	III/d	01/04/2022	III-B	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	06/04/2023	14 Thn. 2 Bln.	DIKLAT PIM IV	2017	S-1S-1 KEHUTANAN	1999	48 thn 5 bln
17.	AHMAD IRAWANDHI S.Kom LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 17/02/1982	198202172011011004	7	III/d	01/04/2023	JFU	ANALIS PERBENDAHARAAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	13 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2012	S-1S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2009	42 thn 0 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	CHRISTINE MIMILONA MAXIMOVA S.E PEREMPUAN Tumbang Kaman, 03/03/1977	197703032000032004	6	III/d	01/04/2023	JFU	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	24 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	2000	S-1EKONOMI AKUNTANSI	2010	47 thn 0 bln
19	SUKMAWINATA SE PEREMPUAN Kotim, 08/02/1968	196802081995032004	7	III/d	01/04/2023	JFU	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SUB BIDANG AKUNTANSI 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2023	29 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	1996	S-1S-1 MANAJEMEN	2014	56 thn 1 bln
20.	NURASIAH SARASWATI WIDYANINGRUM, S.E., Ak PEREMPUAN BANJARMASIN, 11/11/1980	198011112011012010	9	III/d	01/04/2023	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	24/10/2022	13 Thn. 2 Bln.	DIKLAT PIM IV	2017	S-1EKONOMI AKUNTANSI	2004	43 thn 4 bln
21.	AHMAD FAHRAMI S.H LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 18/10/1984	198410182011011010	9	III/d	01/04/2023	IV-A	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	28/04/2022	13 Thn. 2 Bln.	DIKLAT PIM IV	2022	S-1S-1 ILMU HUKUM	2007	39 thn 4 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	TITIN NOVIANTI S.E PEREMPUAN BARITO SELATAN, 13/11/1985	198511132011012005	9	III/d	01/04/2023	IV-A	KEPALA SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH DAN DANA TRANSFER SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH DAN DANA TRANSFER BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	24/10/2022	13 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-1S-1 AKUNTANSI	2010	38 thn 4 bln
23.	OKMAYASIE, S.E., M.Si PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 02/10/1984	198410022006042007	7	III/d	01/10/2023	JFU	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN SUB BIDANG AKUNTANSI 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2023	17 Thn. 11 Bln.	PRAJABATAN	2007	S-2SAINS MANAJEMEN	2013	39 thn 5 bln
24.	HERISIDA S.E PEREMPUAN Butong, 15/12/1980	198012152003122007	7	III/c	01/04/2020	JFU	ANALIS REKENING PEMERINTAH SUB BIDANG KAS UMUM DAERAH DAN DANA TRANSFER BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2023	20 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2004	S-1S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2022	43 thn 2 bln
25.	ANASISKA KRISTINA NATALIA S.E PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 02/06/1986	198606022015032005	9	III/c	01/04/2023	IV-A	KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	24/10/2022	9 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	2016	S-1AKUNTANSI	2007	37 thn 9 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	DEVI INDRIA SARI SE,M.Si PEREMPUAN AMUNTAL, 20/12/1980	198012202003122008	11	III/c	01/04/2023	III-B	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	23/09/2023	20 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2004	S-2MANAJEMEN	2017	43 thn 2 bln
27.	KRISTIANA EB S.E PEREMPUAN BARITO UTARA, 07/04/1983	198304072010012036	7	III/c	01/10/2023	JFU	ANALIS ASET DAERAH SUB BIDANG PEMANFAATAN PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	14 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-1MANAJEMEN	2014	40 thn 11 bln
28.	CHICILIA ANASTASIA ANNGELICA S.E PEREMPUAN BANJARMASIN, 21/07/1984	198407212010012008	9	III/c	01/10/2023	IV-A	KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	24/10/2022	14 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-1AKUNTANSI	2014	39 thn 7 bln
29.	FRANS TATANG LAKI-LAKI BANJARMASIN, 04/03/1970	197003041993031005	5	III/b	01/10/2013	JFU	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB BIDANG PERBENDAHARAAN 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	31 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	1993	SLTAIPS	1991	54 thn 0 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	HENDRA S.Kom LAKI-LAKI PALANGKA RAYA, 18/06/1979	197906182010011007	7	III/b	01/10/2020	JFU	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BAGIAN PERENCANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	14 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2011	S-1SISTEM INFORMASI	2015	44 thn 8 bln
31.	WIDIA NINGSIH S.E. PEREMPUAN BOGOR, 01/09/1976	197609012009042004	9	III/b	01/10/2021	IV-A	KEPALA SUB BIDANG MONITORING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SUB BIDANG MONITORING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	24/10/2022	14 Thn. 11 Bln.	PRAJABATAN	2010	S-1S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2022	47 thn 6 bln
32.	DIANA AULIA HINDAYANI, S.E PEREMPUAN PANGKALAN BUN, 24/07/1986	198607242011012016	6	III/b	01/04/2023	JFU	PENGELOLA DATA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	13 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2012	D-IIIKUNTANSI	2007	37 thn 7 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	KUMI INDANG INARA S.Ak. PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 05/10/1979	197910052011012011	6	III/b	01/04/2023	JFU	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	13 Thn. 2 Bln.	PRAJABATAN	2012	S-1S-1 AKUNTANSI	2021	44 thn 5 bln
34.	AHMAD FADLIANOR ELMI LAKI-LAKI BUNTOK, 09/09/1984	198409092003121011	7	III/a	01/04/2020	JFU	BENDAHARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	20 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2004	SLTAIPA	2003	39 thn 6 bln
35.	RAHIMAH PEREMPUAN TAMBAN, 27/12/1971	197112272003122002	5	III/a	01/04/2021	JFU	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	20 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2004	SLTAADMINISTRASI PERKANTORAN	1990	52 thn 2 bln
36.	HANDRI ARIFIN S.Kom. LAKI-LAKI MURUNG RAYA, 01/09/1985	198509012020121004	7	III/a	01/02/2022	JFU	ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN SUB BIDANG ANGGARAN 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/02/2022	3 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2021	S-1S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2008	38 thn 6 bln
37.	PILIPUS REGEN S.Kom. LAKI-LAKI KAPUAS HULU, 29/11/1985	198511292020121007	7	III/a	01/02/2022	JFU	ANALIS TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2022	3 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2021	S-1S-1 SISTEM INFORMASI	2010	38 thn 3 bln

NO	NAMA PEGAWAI / GENDER / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	KELAS JABATAN	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR		USIA
				GOLRU	TMT	ESELON	NAMA JABATAN	TMT	TAHUN BULAN	NAMA	TAHUN	NAMA JURUSAN	THN LULUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	IQBAL WILDA TYASA S.Pn. LAKI-LAKI PASURUAN, 06/11/1991	199111062020121010	7	III/a	01/02/2022	JFU	ANALIS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TRANSFER SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/07/2022	3 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2021	S-1S-1 PERPAJAKAN	2014	32 thn 4 bln
39.	DESTARIKA ISNAANI LATIFAH SETYO BUDI S.E. PEREMPUAN SUKOHARJO, 10/12/1992	199212102020122015	6	III/a	01/02/2022	JFU	PENGELOLA DATA REKONSILIASI SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/02/2022	3 Thn. 3 Bln.	PRAJABATAN	2021	S-1S-1 AKUNTANSI	2017	31 thn 3 bln
40.	YOLA FITRIANA A.Md.Ak PEREMPUAN PALANGKA RAYA, 05/01/1998	199801052019032001	6	II/c	01/03/2020	JFU	PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 2021	01/01/2022	5 Thn. 0 Bln.	PRAJABATAN	2019	D-III AKUNTANSI	2018	26 thn 2 bln

Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Palangka Raya pada tahun 2024 yang terdiri dari :

**JUMLAH DAN KOMPOSISI
PNS BPKAD KOTA PALANGKA RAYA**

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	10 Orang
2.	BIDANG ANGGARAN	4 Orang
3.	BIDANG PERBENDAHARAAN	11 Orang
4.	BIDANG AKUNTANSI	6 Orang
5.	BIDANG PENGELOLAAN ASET	8 Orang
	T O T A L	39 Orang

JABATAN STRUKTURAL PADA BPKAD :

1. KEPALA BADAN : 1 Orang
2. SEKRETARIS : 1 Orang
3. KEPALA BIDANG : 4 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN : 2 Orang
5. KEPALA SUB BIDANG : 8 Orang
6. PELAKSANA : 26 Orang

Adapun data karyawan DPKAD Kota Palangka Raya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**JUMLAH DAN KOMPOSISI
PNS BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	S3	- Orang
2.	S2	8 Orang
3.	S1	28 Orang
4.	Diploma	3 Orang
5.	SLTA	3 Orang
	T O T A L	42 Orang

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
U P B : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
NO. KODE LOKASI : 12.24.06.04.02.01.01

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	800	2016	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	13/08/1994	594.2/181/KL-LK/1994	Pembangunan Kantor	Pembelian	301.925	Ganti Rugi tanah untuk pembangunan kantor dari pemilik tanah An. ABADI (Surat Pernyataan Tanah) Ganti Rugi
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	225	2016	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	13/08/1994	594.2/182/KL-lk/94	Pembangunan Kantor	Pembelian	48.075	tanah untuk pembangunan kantor dari pemilik tanah An.IJAR, S.Ag (Surat Pernyataan Tanah)
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	54	2016	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	13/08/1994	594-2/182/KL-LK/94	Pembangunan Kantor	Pembelian	49.500	Ganti Rugi Tanah Bangunan AN. IJAR,S.Ag alamat Jl. Pembangunan I
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	1.339	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	12/12/2009	140.594/1.409/KL-MTG/PEM/2009	Tanah Untuk Pembangunan Kantor	Pembelian	128.707	RT/RW.28/IX Kelurahan Melayu. Kec. Teweh Tengah Kab.Barito Utara (Surat
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000005	962	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	15/05/2015	593/138b/107/Pem-5/2015	Untuk Pembangunan Gedung Kantor	Pembelian	108.706	Pernyataan Tanah) Ganti rugi tanah An. Drs. Utayama Hermansyah, M.Si Alamat Jl. Jati No.43 RT.003/RW.XII Palangka Raya (Berita Acara Pemeriksaan Tanah) Ganti rugi tanah An. Drs. Utayama Hermansyah, M.Si Alamat Jl. Jati No.43 RT.003/RW.XII Palangka Raya (Surat

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Keterangan Ahli Waris)
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000006	108	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	19/09/2006	594/752/BAB/PEM/MTG/2006	Untuk Pembangunan Perkantoran	Pembelian	12.204	Ganti Rugi Tanah An.Hj.Rita Silay,S.Pd. Alamat Jl.Mandang/Jl.Cemara No 36 RT.03/RW.III Palangka Raya (Berita Acara Pemeriksaan Tanah)
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000007	123	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	22/01/2014	140.594/41/KL-MTG/PEM	Pembangunan Kantor	Pembelian	13.899	Ganti Rugi Tanah dengan An. Tekad Santoso, Alamat, Jl. Mendawai No. 321 B, RT/RW 08/VII Palangka Raya (Surat Pernyataan Tanah)
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000008	14	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	02/03/2015	594.138/17.55/Pr-III/2015	Pembangunan Kantor	Pembelian	1.596	Ganti Rugi Tanah dengan An. Symsuri, Alamat Jl. Yos Sudarso VIII RT. 05, RW. 06 Kel, Menteng, Kec., Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Surat Pernyataan Tanah)
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000009	204	2017	Jl. G.Obos XIV/Gang Banjar RT/RW 10/VIII/Palangka Raya	Hak Pakai	15/06/2016	140.594/391/KL-MTG/PEM	Pembangunan Kantor	Pembelian	23.052	Ganti Rugi Tanah dengan An. Johansyah, alamat Jl. G.Obos XIV No. RT. 10 RW. 06 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Surat Pernyataan Tanah) Tanah Sebagai Kawasan Strategis Kota Untuk Kawasan Pendidikan, Pemerintahan dan Kepolisian Daerah Kota Palangka Raya
10	Tanah Kosong Yang Sudah diperuntukan	01.01.02.02.002	000001	500.000	2016	Jln. Dulin Kandang (G. Obos Km.7 Palangka Raya)	Hak Pengelolaan	13/04/1998	36/50.1.42.SITE.IV.98	Pembangunan Perkantoran	Hibah	1.500.000	Ganti rugi tanah pembongkaran jembatan, pondasi pagar An Pemilik Noordiansyah,SH atas keputusan Pengadilan Negeri
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	01.01.03.07.002	000001	1.365	2013	Jl. RTA MILINO KM 6,5 Palangka Raya	Hak Pakai	14/11/2013	593.1.138b/199/Pem-XI/13	Untuk Jalan Dinas PU Provinsi	Pembelian	180.383	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang 1.3.	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal					Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													NO 26/Pdt.G/2008/PNP. L.R tanggal 2 Nopember 2012. Jalan tersebut diambil alih oleh Dinas PU Provinsi dalam hal pengelolaannya. (Surat Keterangan
Jumlah Harga											2.368.047		

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
U P B : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
NO. KODE LOKASI : 12.24.06.04.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Baik	Tidak	Beton	355.65	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	11/01/2003	16/Pro-PDPK/1/2003	Tanah Hak Pakai		Pembelian		1.645.578	Gedung A Utama (Berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi status pinjam pakai) Bangunan Gedung Kantor Ek. DPK Kota Palangka Raya
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Tidak	362	Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya			Tanah Hak Lainnya		Pembelian		1.422.002,20	Perolehan BPMPKAB Kota Palangka Raya Tahun 2015
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000001	Baik	Tidak	Beton	587.11	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	31/12/2011		Tanah Hak Pakai		Pembelian		527.030	Bangunan Gedung C Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dengan status Tanah Pinjam Pakai Dengan Pemerintah Provinsi Bangunan Box ATM
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000002	Baik	Tidak	Beton	15.72	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	31/12/2012		Tanah Hak Pakai		Pembelian		85.000	
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000003	Baik	Tidak	Beton	54.08	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	30/12/2013		Tanah Hak Pakai		Pembelian		115.000	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor						
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000004	Baik	Tidak	Beton	387	Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	11/01/2003	16/Pro-PDPK/1/2003		Tanah Hak Pakai	Pembelian	1.350.244,60	Gedung B Bidang Aset dan Akuntansi (Berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi pinjam pakai) Gedung Gudang Arsip/Tanah Pinjam Pakai Dengan Pemerintah Provinsi	
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000005	Baik	Tidak	Beton	128	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	31/12/2012			Tanah Hak Pakai	Pembelian	319.250	Gedung Gudang Arsip/Tanah Pinjam Pakai Dengan Pemerintah Provinsi status pinjam pakai) Gedung Gudang/Bengkel Ek. DPK Kota Palangka Raya	
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.01.01.02.001	000001	Kurang Baik	Tidak	Beton	293	Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya				Tanah Hak Lainnya	Pembelian	223.770	Bangunan Gudang/Bengkel Ek. DPK Kota Palangka Raya	
9	Gedung Garasi/Pool Permanen	03.01.01.14.001	000001	Baik	Tidak	Beton	158,4	Balai Kota KM 5,5 Jl. Tjilik Riwut	31/12/2012			Tanah Hak Pakai	Pembelian	305.498	Bangunan Parkir dibelakang Gedung A/Tanah Pinjam Pakai Dengan Pemerintah Provinsi	
10	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	03.01.01.33.001	000001	Baik	Tidak	Beton	26,8	Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya (Kantor BPKAD)	21/11/2022	001114/UP/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.03/11/2022			Pembelian	19.955	Bangunan Parkir dibelakang Gedung A/Tanah Pinjam Pakai Dengan Pemerintah Provinsi	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor						
11	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	03.01.01.33.001	000002	Baik	Tidak	Beton	32.4	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya (Kantor BPKAD Kota Palangka Raya)	06/12/2022	900/2508/Sekr-BPKAD/XII/2022				Pembelian	44.675	Kendaraan Operasional Hilux Tempat Parkir Kabin dan Sekretaris BPKAD Kota Palangka Raya Fisik
12	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	03.01.01.33.001	000003	Baik	Tidak	Beton	32.4	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya (Kantor BPKAD Kota Palangka Raya)	06/12/2022	900/2508/Sekr-BPKAD/XII/2022				Pembelian	44.675	39.750.000 Perencanaan 2.800.000 Pengawasan 2.000.000 Tempat Parkir Kabid Akuntansi dan Kabid Perbendaharaan BPKAD Kota Palangka Raya Fisik
13	Pagar Semi Permanen	03.04.01.04.002	000001	Baik	Tidak	Tidak	109.9	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya (Lokasi di Kantor Ex. BPM)	06/12/2022	900/2505/sekr-BPKAD/XII/2022				Pembelian	47.506,80	Pembuatan Pagar Baja "Ringan Fisik Rp. 42,166,800.01, Perencanaan Rp. 3,1150.00 dan pengawasan Rp.2,2250.00"
Jumlah Harga															6.150.184,60	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Layanan jasa Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Palangka Raya, yang melakukan tugas pelayanan seperti :

1. Efisiensi Administrasi: Mengukur efisiensi dalam penanganan administrasi keuangan daerah, termasuk dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengelolaan aset.
2. Ketepatan Waktu: Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam penyelesaian proses pembayaran, pencairan dana, atau pengurusan dokumen.
3. Penggunaan Teknologi: Memastikan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pelayanan. Ini bisa mencakup sistem informasi keuangan, aplikasi pengelolaan aset, atau platform komunikasi dengan pemangku kepentingan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau unit-unit internal pemerintah daerah. Ini dapat meliputi pelatihan staf, pengembangan sistem, atau penyusunan standar pelayanan.
5. Responsif terhadap Kebutuhan: Menjadi responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat atau unit-unit pemerintah daerah terkait layanan keuangan dan aset. Ini melibatkan mekanisme umpan balik dan perbaikan berkelanjutan.
6. Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa semua pelayanan yang disediakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan terhadap standar akuntansi, perpajakan, dan regulasi terkait lainnya.
7. Transparansi: Memastikan transparansi dalam proses pelayanan keuangan dan aset daerah, termasuk publikasi informasi yang relevan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat umum.

Dimana indikator kinerja utama BPKAD adalah indeks pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPK) dan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah dua indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap penggunaan APBD untuk kepentingan pembangunan Kota Palangka Raya serta sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangani bertujuan Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palangka Raya atas penggunaan APBD Kota Palangka Raya setiap akhir tahun anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi, alokasi, perubahan dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan setiap tahunnya.

Dari Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia setiap tahunnya didapatlah Opini Publik terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa Opini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai berikut :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Pemerintah Kota Palangka Raya menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam RENSTRA periode 2024-2026 untuk setiap tahunnya, Hasil pemeriksaan BPK tersebut masih belum ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- a. Masih adanya SKPD yang kurang memahami laporan persediaan sehingga menghambat penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;

- b. Masih kurang baiknya pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya baik dari segi administrasi barang dari tiap SKPD/Unit Kerja yang masih belum tertib maupun dari segi kontrol, inventarisasi dan penguasaan fisiknyadikarenakan masih banyaknya aset-aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum terlacak
- c. Masih kurangnya peran pengawas internal dalam pelaksanaan pengendalian Internal.

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka Bidang Akuntansi BPKAD Kota Palangka Raya akan mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

- a. Melakukan pelatihan formal dan non formal;
 - b. Merevisi dan membuat peraturan perundang-undangan dibidang keuangan untuk menciptakan internal control yang baik;
 - c. Adanya rekonsiliasi antar bidang maupun SKPD terkait lainnya;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah.

Jumlah SKPD yang Telah Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka BPKAD Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan didalam Perencanaan kebutuhan, Pengelolaan, Penggunaan, Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam hal ini Bidang Aset BPKAD Kota Palangka Raya dibantu oleh semua SKPD pengguna Barang Milik Daerah.

Dalam implementasinya pengelolaan barang daerah adalah sebuah pekerjaan yang sangat membutuhkan perhatian besar dan koordinasi yang berkelanjutan selaras dengan tingkat kebutuhan barang di semua SKPD terkait dengan mengutamakan Azas fungsional, Kepastian Hukum, transparansi, Efisiensi, Akuntabilitas dan Kepastian Nilai, untuk itu bidang Aset BPKAD membuat sebuah Alat Kerja berupa Sistem yang diharapkan dapat membantu BPKAD Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Barang Millik Daerah yaitu Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD).

Dengan adanya Sistem tersebut, maka dibutuhkan adanya koordinasi dengan semua unsur pengguna Barang Daerah yang meliputi semua SKPD sampai tingkat terkecil yaitu Unit Kerja/Teknis di wilayah. Berkenaan dengan hal ini maka optimalisasi Kinerja para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di tiap-tiap SKPD dan Unit Kerja sangat diharapkan sebagaimana Tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas Penyimpan Barang:

- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;

- d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
- f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

Tugas Pengurus Barang:

- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
- d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Para Penyimpan dan Pengurus Barang di masing-masing SKPD tersebut akan bertanggung jawab dalam terciptanya Administrasi yang Tertib dalam pengelolaan Barang Daerah yang merupakan salah satu target Indikator Kinerja BPKAD Kota Palangka Raya

Beberapa komponen yang diterapkan dalam monitoring dan pengendalian administrasi pengelolaan barang daerah di tiap-tiap SKPD maupun Unit Kerja yang terdiri dari:

- a. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB);
- c. Laporan Semesteran; dan
- d. Laporan Tahunan.

ini menunjukkan adanya upaya-upaya serius yang dilakukan oleh BPKAD Kota Palangka Raya khususnya Bidang Aset selaku pelaksana tugas tersebut dan menjadi sebuah tantangan dalam periode RPJMD Tahun 2018–2023 mendatang tentunya dengan meningkatkan lagi seluruh aspek pengendalian dan pengelolaan barang daerah

Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Perda/Perkada.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menunjang pembangunan dimana proses penyusunan yang baik, benar dan tepat waktu menjadi hal utama dalam mencapai optimalisasi penganggaran yang tepat guna bagi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan tahapan-tahapan dan komponen pendukung yang baik dan terencana/terprogram dengan persiapan yang sedemikian baik untuk mencapai hasil yang maksimal, diantara komponen pendukung yang sangat penting BPKAD Kota Palangka Raya melalui Rencana Strategis BPKAD Kota Palangka Raya melakukan langkah-langkah yang dapat mendukung pelaksanaan

proses penyusunan APBD Kota Palangka Raya setiap tahunnya dengan menyediakan Peraturan dan Instrumen Penganggaran yang diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Kota secara umum serta SKPD terkait yang membutuhkan baik dalam proses Perencanaan Anggaran Kota, Penyusunan Kegiatan sampai kepada Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Adapun target dan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD
Kota Palangka Raya

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan			Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-
2	Penetapan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tdk. Tepat Waktu					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	-	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penetapan APBD	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
3	waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	-	-	-	75%	80	-	-	-	20,15	92,80	-	-	-	-	0,05	-	-	-
4	Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	-	-	-	75	80	-	-	-	98,65	81,97	-	-	-	-	0,01	-	-	-
5	Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	-	-	-	75	80	-	-	-	92,29	86,35	-	-	-	-	0,01	-	-	-
7	Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota	-	-	-	75	75	-	-	-	100	97,59	-	-	-	-	0,01	-	-	-

pma	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-												
						2019		2020		2021		2022		2025				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP = 100%	100	6.937.781.833	100	7.489.187.382	100	6.937.781.833						
				2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu = 100%	100		100		100							
		1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Indeks Pengeloaan Keuangan dan Aset	0	80	51.289.349.214					90	22.012.403.235	90	13.732.596.672	90	11.541.915.606
		2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			0							90	1.535.078.251	90	1.316.431.200	90	1.150.924.250

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-												
						1		2		3		4		5				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16								
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP = 100%	100	6.937.781.833	100	5.944.195.901	100	6.561.491.522						
				2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu = 100%	100		100		100							
		1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Indeks Pengeloaan Keuangan dan Aset	0	80	51.289.349.214					70,31	13.762.892.794	64,23	10.258.577.784	64,23	10.258.577.784
		2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			0							70,31	1.312.313.410	64,23	1.165.640.345	64,23	1.150.924.250

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kotaTahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir			
							1		2		3		4		5							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		17		18		19		20		21		22		23			
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP = 100%	100	6.937.781.833	100	79,37	100	94,58							100	12.505.687.423	1	1,80
				2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu = 100%	100		100									100	1			
		1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset	0	80	51.289.349.214					78,12	62,52	64,23	74,70	71,37	88,88	66,26	34.280.048.361,78	0,83	0,67
						0							85,49		88,55	100	3.628.878.005	0,07				

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya dalam 3 (tiga) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Palangka Raya, antara lain :

2.4.1. TANTANGAN

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan urat nadi bagi berjalannya roda pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut dibutuhkan pendanaan sebagai input bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam mengelola keuangan daerah, terdapat asas umum yang harus dipatuhi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengelola keuangan daerah secara taat azas.

Tantangan utama yang dihadapi BPKAD Kota Palangka Raya pada periode Tahun 2024 sampai dengan 2026 diantaranya: Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah guna meningkatkan keterpaduan penganggaran terhadap perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pengelola kas yang efektif dan efisien melalui kebijakan manajemen kas yang komprehensif, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel guna mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana setidaknya ada 4 indikator yang menjadi faktor penentu (K/L) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, laporan keuangan harus disajikan secara konsisten dan akuntabel. Keempat, pengendalian internal harus efektif dan efisien dan yang tidak kalah penting optimalisasi tata Kelola barang milik daerah menuju pengelolaan aset yang berdaya guna dan peningkatan sarana penunjang

Dengan perkembangan dibidang Teknologi Informasi, BPKAD Kota Palangka Raya dituntut untuk memiliki aparatur yang cakap dan handal dalam menjalankan tugas, dimana kecakapan dan keterampilan aparatur sangat mendukung penyelesaian tugas yang tepat waktu, cermat dan akurat serta bertanggungjawab. Disamping itu pemahaman atas peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar tercapainya satu kesepahaman yang sama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

Dengan adanya aparatur yang cakap dan handal dalam menjalankan tugas, tentunya kedepan peluang BPKAD Kota Palangka Raya dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat, akuntabel dan transparan kepada semua pemangku kepentingan.

beberapa peluang pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam menghadapi tahun 2024-2026 antara lain:

1. Meningkatkan keterpaduan penganggaran terhadap perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas melalui kebijakan manajemen kas yang komprehensif
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD KOTA PALANGKA RAYA.

Proses pengelolaan keuangan daerah secara umum dibagi kedalam lima kelompok yaitu; Penyusunan Rancangan APBD, Dokumen Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran, Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan APBD.

BPKAD Kota Palangka Raya dalam menjalankan tatanan proses pengelolaan keuangan tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang sering kali muncul dan tentunya perlu solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal.

Permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Palangka Raya yang sering kali muncul secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua tataran yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

- Kurang optimalnya pelaksanaan tugas akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah dan kemampuan personil secara umum.
- Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan .
- Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran dan sumber daya manusia.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Palangka Raya sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kota Palangka Raya :

1. Bidang Anggaran

- a. Ketidaktepatan Data dan Informasi: Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan APBD. Kesulitan dalam mengumpulkan data, mengkoordinasikan informasi dari berbagai unit kerja, atau ketidaksesuaian data dapat memperlambat proses penetapan APBD
- b. Konflik Kepentingan dan Perbedaan Pendapat: Terjadinya konflik kepentingan atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, legislatif, dan eksekutif, dapat memperlambat proses penetapan APBD. Perbedaan pandangan terkait alokasi dana atau prioritas program dan kegiatan dapat menyebabkan negosiasi yang memakan waktu
- c. Proses Legislasi yang Lambat: Proses legislatif yang lambat, seperti pembahasan yang berlarut-larut di lembaga legislatif, dapat

menyebabkan keterlambatan penetapan APBD. Perbedaan pendapat, kepentingan politik, atau kurangnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat memperlambat proses tersebut;

- d. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Palangka Raya;
- e. Kurangnya instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
- f. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
- g. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2. Bidang Perbendaharaan:

- a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
- b. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
- c. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
- d. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
- e. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
- f. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
- g. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun

3. Bidang Akuntansi:

- a. Penyampaian laporan keuangan daerah masih belum tepat waktu.
- b. Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
- c. Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;
- d. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4. Bidang Pengelolaan Aset:

- a. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai
- b. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
- c. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Palangka Raya belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan
- d. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
- e. Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual
- f. Prosedur penilaian BMD belum memadai

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang dituangkan dalam Misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Aparatur Pemerintah Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”** dengan sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang diukur melalui indikator Opini Pengelola Keuangan Daerah

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Tata kelola Pemerintahan Kota Palangka Raya masih belum baik	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi kualitas perencanaan pembangunan.	Kurangnya SDM Perencana
		Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	Kurangnya SDM Pengelolaan Keuangan Daerah
			Belum optimalnya akurasi data dan dokumen aset ditiap perangkat daerah
		Kualitas Sumber Daya Manusia dan daya saing ASN	Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional.
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum optimal (Inspektorat)	Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
			Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah
Kegiatan Sekretariat Dewan bersifat administrative yaitu	Jumlah produk hukum yang akan diajukan belum		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		berupa produk hukum yang akan diajukan.	sepenuhnya didampingi oleh tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi akademis
		Penyusunan LPPD	LPPD belum dijadikan bahan evaluasi untuk mendeteksi kinerja Perangkat Daerah
		Belum terintegrasinya aplikasi, jaringan/koneksi dan data antar perangkat daerah	Minimnya penyediaan sarana dan jaringan TIK
		Masih Rendahnya Digitalisasi Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Masih kurangnya literasi
			Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
			Belum optimalnya pengelolaan arsip
			Terbatasnya jumlah arsiparis

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kota Palangka Raya.

Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua				
No.	Misi Kota Palangka Raya	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Aparatur Pemerintah Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa serta Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	<p>Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya pelaksanaan tugas akibat beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah dan kemampuan personil secara umum. - Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah . - Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan . - Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran dan sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran: BPKAD dapat mengalami kendala dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan pelayanan. Keterbatasan anggaran dapat membatasi investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Jika BPKAD memiliki kekurangan tenaga kerja atau staf yang kurang terampil dalam bidang keuangan dan pengelolaan aset, pelayanan dapat terhambat. Keterbatasan SDM dapat mempengaruhi kemampuan BPKAD untuk memberikan layanan yang efektif dan responsif. 3. Kompleksitas Peraturan dan Prosedur: Adanya peraturan dan prosedur yang kompleks dan rumit dapat memperlambat proses pelayanan BPKAD. Jika prosedur yang berbelit-belit, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. 4. Infrastruktur dan Teknologi yang Terbatas: Kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam BPKAD dapat menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas. Misalnya, kekurangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat menjadi pendorong bagi BPKAD untuk meningkatkan pelayanan. Pemimpin yang mendorong inovasi, efisiensi, dan akuntabilitas dapat memotivasi staf dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. 2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: SDM yang kompeten dan terlatih dalam bidang keuangan dan pengelolaan aset dapat menjadi pendorong pelayanan yang baik. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat memberikan pelayanan yang profesional dan efektif. 3. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi yang Tepat: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pelayanan BPKAD. Sistem yang terintegrasi dapat memfasilitasi alur kerja yang lancar dan meminimalkan kesalahan manusia. 4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kerjasama yang baik dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan pelayanan BPKAD. Kolaborasi yang baik dapat memperluas jaringan, mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas layanan. 5. Penyederhanaan Prosedur dan Peraturan: Penyederhanaan

			memperlambat proses administrasi dan pelaporan.	
--	--	--	-------------------------------------------------	--

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah.

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang di pusat dan daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu:

'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bertujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.

Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Perpres tersebut terdapat perubahan nomenklatur beberapa Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dengan perubahan nomenklatur tersebut, upaya Kemendagri menjadi poros pemerintahan antar pusat dan daerah, dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mendukung politik dan pembangunan nasional maupun daerah. Visi dan Misi Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif "

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
2. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
5. Pengelolaan kekayaan daerah;
6. Pinjaman dan hibah daerah;
7. Pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
8. Fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
7. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Rencana Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi sebagai berikut:

Tujuan :

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif".

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif maka menentukan arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah sangatlah penting, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dari Rencana Strategis Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut dapat terlihat adanya keterkaitan antara Sasaran Renstra Kementerian tersebut dengan permasalahan yang ada di Kota Palangkaraya sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong terhadap kinerja BPKAD Kota Palangkaraya seperti tergambar pada tabel berikut ini :

TABEL.3.3
HUBUNGAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DENGAN

SASARAN RENSTRA K/L & PROVINSI	SASARAN RENSTRA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA	INDIKATOR KINERJA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

<p>Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan</p> <p>3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

RENSTRA BPKAD KOTA PALANGKA RAYA

Dengan menelaah visi, misi, dan Rencana Kerja **'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'** Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan dapat dijadikan telaahan untuk menentukan visi, misi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Sehingga seluruh kebijakan yang diambil 5 (lima) tahun ke depan dapat selaras dengan visi, misi dan kebijakan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Capaian	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945; 2. UU RI No 23 Tahun 2014 3. UU No 5 Tahun 1965 4. UU No 28 Tahun 1999 5. UU No 17 Tahun 2003 6. UU No 1 Tahun 2004 7. UU No 15 Tahun 2004 8. UU No 25 Tahun 2004 9. UU No 32 Tahun 2004 10. UU No 33 Tahun 2004 	<p>Faktor internal yang dapat mempengaruhi Rencana Strategis (Renstra) BPKAD antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Manajemen: Komitmen dan dukungan yang kuat dari manajemen BPKAD sangat penting untuk kesuksesan implementasi Renstra. Jika manajemen tidak sepenuhnya terlibat atau tidak 	<p>Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Rencana Strategis (Renstra) BPKAD antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat berdampak signifikan pada Renstra BPKAD. Perubahan kebijakan fiskal, regulasi, atau kebijakan sektor tertentu dapat 	<p>Kurang sinerginya pelayanan pengelolaan keuangan daerah.</p>

Aspek Capaian	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5
	11. UU No 12 Tahun 2011 12. PP No 20 Tahun 2001 13. PP No 24 Tahun 2005 14. PP No 54 Tahun 2005 15. PP No 55 Tahun 2005 16. PP No 56 Tahun 2005 17. PP No 57 Tahun 2005 18. PP No 58 Tahun 2005 19. PP No 65 Tahun 2005 20. PP No 8 Tahun 2006 21. PP No 38 Tahun 2007 22. PM No 80 Tahun 2015 23. Perda Kota Palangka Raya No 02 Tahun 2010 24. Perda Kota Palangka Raya No 2 Tahun 2019 25. Perwali Kota Palangka Raya No 64 Tahun 202 26.	- memprioritaskan Renstra, hal itu dapat menghambat pengimplementasian rencana dan pencapaian tujuan strategis. - Sumber Daya Manusia: Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di BPKAD memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan Renstra. Jika BPKAD memiliki SDM yang terampil, berpengetahuan luas, dan berkomitmen, mereka akan dapat mendukung implementasi Renstra dengan baik. Namun, jika BPKAD menghadapi keterbatasan dalam jumlah atau kualitas SDM, hal itu dapat mempengaruhi kemampuan BPKAD dalam mencapai tujuan strategis. - Ketersediaan Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Renstra. Jika BPKAD tidak memiliki anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan strategis yang diusulkan dalam Renstra, hal itu dapat membatasi kemampuan BPKAD untuk mencapai tujuan strategis. - Sistem Informasi dan Teknologi: Ketersediaan sistem informasi dan teknologi yang memadai sangat penting dalam mendukung implementasi Renstra. Sistem informasi yang baik dapat membantu BPKAD dalam pengumpulan, dan pemrosesan, dan	mempengaruhi prioritas, sumber daya, atau lingkup kegiatan yang tercantum dalam Renstra. 2. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan stabilitas keuangan, dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra BPKAD. Perubahan dalam kondisi ekonomi dapat mempengaruhi alokasi anggaran, sumber daya yang tersedia, atau kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 3. Sumber Daya Keuangan: Ketersediaan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat, transfer keuangan, pajak daerah, atau sumber pendapatan lainnya dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra. Jika sumber daya keuangan terbatas, BPKAD mungkin harus melakukan penyesuaian terhadap Renstra yang telah ditetapkan. 4. Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Terkait: Keterlibatan masyarakat, stakeholder, dan pihak terkait lainnya dapat mempengaruhi Renstra BPKAD. Masukan, harapan, atau tuntutan dari masyarakat, LSM, organisasi bisnis, atau kelompok kepentingan lainnya dapat mempengaruhi prioritas, program, atau kebijakan yang	

Aspek Capaian	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5
		<p>pelaporan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra.</p> <p>- Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi sangat penting dalam implementasi Renstra. Jika BPKAD memiliki budaya yang terbuka terhadap perubahan, kolaboratif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan, hal itu akan mendukung upaya implementasi Renstra.</p> <p>- Pengelolaan Risiko: Kemampuan BPKAD dalam mengelola risiko yang terkait dengan implementasi Renstra juga merupakan faktor internal yang penting. Jika BPKAD tidak memiliki proses yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Renstra, hal itu dapat menghambat pencapaian tujuan strategis.</p>	<p>diusulkan dalam Renstra.</p> <p>5. Perkembangan Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang keuangan, pengelolaan aset, atau sistem informasi dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra. BPKAD mungkin perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>6. Perubahan Sosial dan Demografi: Perubahan sosial, demografi, atau kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi prioritas, kebijakan, atau program yang tercantum dalam Renstra. BPKAD perlu memperhatikan perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa Renstra mereka relevan dengan kondisi sosial dan demografi terkini.</p> <p>Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, atau masalah keberlanjutan dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra BPKAD. BPKAD perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah.</p>	

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572 Km² dan 1.053,14 Km²

Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Kawasan Hutan	:	2.485,75 Km ²
Tanah Pertanian	:	12,65 Km ²
Perkampungan	:	45,54 Km ²
Perkebunan	:	22,30 Km ²
Sungai dan Danau	:	42,86 Km ²
Lain-lain	:	69,41 Km ²

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2009

PENATAAN RUANG Pemerintah Kota Palangka Raya

Komposisi penggunaan lahan di Kota Palangka Raya sampai tahun 2016 terdiri atas 27,6% kawasan lindung dan 72,4% kawasan budidaya. Yang termasuk dalam Kawasan Lindung yaitu Daerah Sempadan Sungai (DSS), Hutan Lindung, Suaka Alam, Taman Nasional Darat dan Cagar Alam Darat. Sedangkan yang termasuk dalam Kawasan Budidaya yaitu Area Penggunaan Lainnya (APL), Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP). Komposisi kawasan digambarkan pada grafik berikut:



Grafik 2.4 Komposisi Penggunaan Lahan Tahun 2016

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017, BPS Kota Palangka Raya
 Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya itu dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah Kota yang terpadu, yaitu :

- Mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini.
- Memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut.
- Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya.
- Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan.
- Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029.
- Memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pusat Perkotaan Nasional, dan Pusat Simpul Transportasi Udara Nasional.



Geologi

Formasi geologi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian besar pasir kuarsa dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

Iklim

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840—3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75—89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C.

Tanah

Tanah—tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah (soil survey staff, 1998) tanah-tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Kota Palangka Raya dalam lingkup Palangka Raya adalah salah satu pusat berbagai jenis aktivitas penting di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat

pada kondisi fisik alam Kota Palangka Raya. Berbagai masalah lingkungan muncul diantaranya : penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antarwilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya.

Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Palangka Raya saja, namun juga tantangan bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Yaitu meliputi wilayah Kabupaten kota, Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Palangka Raya memerlukan sinergitas dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota di Palangka Raya.

Kota Palangka Raya adalah salah satu Kota yang memiliki letak paling strategis karena posisi Kota Palangka Raya terletak ditengah Pulau Kalimantan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, bisnis dan jasa yang secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan Kota Palangka Raya. Salah satu perubahan terhadap pola pengembangan Tata Ruang di Kota Palangka Raya selain makin banyaknya investor di wilayah Kota Palangka Raya makin berkembangnya bisnis perumahan dan properti yang sangat pesat dikarenakan banyak investor dan developer yang melihat peluang dengan banyaknya orang yang bekerja di wilayah kota Palangka Raya lebih memilih untuk menetap dan memiliki rumah tinggal di Kota Palangka Raya. Dengan adanya fenomena ini banyak dampak yang akan terjadi disamping dampak positif yang didapat dengan akan makin berkembangnya perekonomian masyarakat Kota Palangka Raya yang didapat dari penghasilan jasa dan perdagangan serta adanya peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah, maka Kota Palangka Raya akan dihadapkan pada suatu masalah yang tidak kalah pelik yaitu kebutuhan akan sarana umum dan sosial semakin bertambah, pengendalian daerah serapan melalui Ruang Terbuka Hijau untuk mencegah bahaya banjir sebagai dampak berkembangnya lahan terbangun, maka Rencana Pemanfaatan Ruang beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan menjadi perhatian khusus.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang harus peka terhadap kondisi lingkungan Kota Palangka Raya sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus melihat kondisi tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup yang berkembang agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menunjang pembangunan Kota Palangka Raya.

Dengan adanya pengembangan kawasan peruntukan permukiman, maka akan memungkinkan banyaknya bermunculan perumahan-perumahan baru sehingga akan meningkat pula kebutuhan akan lahan sarana-sarana umum dan sosial seperti

jalan umum yang layak, lahan untuk pendirian sarana peribadatan, sarana pemakaman umum, lahan untuk taman bermain, taman kota serta Ruang Terbuka Hijau lainnya yang sudah menjadi kewajiban para Developer/Pengembang untuk menyerahkan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kemudian dijadikan aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya.

BPKAD Kota Palangka Raya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah Kota Palangka Raya memiliki peran untuk mengelola aset-aset milik Pemerintah yang diberikan oleh para Developer tersebut maupun yang telah dimiliki Pemerintah Kota bagi peruntukan sarana dan prasarana perumahan dan Ruang Terbuka Hijau sehingga tercapai pemanfaatan ruang wilayah Kota yang terpola dan terstruktur dengan baik, tepat sasaran, terencana dan selaras

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam konteks Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mungkin mencakup beberapa aspek, tergantung pada mandat dan lingkup kerja BPKAD serta kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Berikut beberapa poin yang bisa diuraikan dalam telaahan tersebut:

1. Kesesuaian Aset dengan RTRW^{**}: Memastikan bahwa pengelolaan aset-aset daerah oleh BPKAD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RTRW. Hal ini termasuk ketersediaan lahan untuk pengembangan, zona-zona tertentu yang harus dilindungi, dan penyesuaian kegiatan-kegiatan keuangan dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan Aset dan Dampak Lingkungan^{**}: Meninjau dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan aset oleh BPKAD. Ini meliputi evaluasi terhadap penggunaan lahan, dampak pencemaran lingkungan, manajemen limbah, dan upaya-upaya yang diambil untuk mitigasi atau mengurangi dampak negatif tersebut.
3. Kepatuhan dengan Peraturan Lingkungan^{**}: Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan pelestarian sumber daya alam.
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan^{**}: Merencanakan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki atau memelihara lingkungan sekitar aset-aset yang dikelola oleh BPKAD. Ini bisa mencakup rehabilitasi lahan, penghijauan, atau pengembangan program-program keberlanjutan.
5. Publik dan Partisipasi^{**}: Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset daerah. Ini termasuk penyelenggaraan pertemuan-pertemuan publik, konsultasi dengan LSM lingkungan, dan pendekatan lain untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
6. Monitoring dan Evaluasi^{**}: Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dari kegiatan-kegiatan BPKAD serta implementasi RTRW. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap kinerja lingkungan BPKAD dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus.

Dalam telaahan tersebut, BPKAD dapat mengevaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan dan pengelolaan asetnya sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset daerah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Secara umum, BPKAD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya mungkin mencakup beberapa hal berikut:

1. Penganggaran: BPKAD Kota Palangka Raya bertanggung jawab dalam menyusun anggaran daerah, mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pemerintah daerah.
2. Pengelolaan Aset Daerah: BPKAD mengelola aset daerah seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan fasilitas lainnya. Mereka bertanggung jawab dalam inventarisasi, pemeliharaan, pengawasan, dan optimalisasi penggunaan aset daerah.
3. Pelaporan Keuangan: BPKAD Kota Palangka Raya menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan daerah. Laporan keuangan ini meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Audit dan Pengawasan Internal: BPKAD dapat melaksanakan fungsi audit dan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan yang baik, dan pencegahan kecurangan.

berikut adalah beberapa saran jangka menengah penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Keuangan:

1. Fokus pada Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: memprioritaskan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ini dapat mencakup peningkatan pelaporan keuangan, pemeriksaan internal yang lebih ketat, dan penerapan standar akuntansi yang lebih baik.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: perlu memperhatikan pengembangan dan penguatan sumber daya manusia. Ini termasuk peningkatan kualitas dan keterampilan SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta pengembangan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
3. Peningkatan Efisiensi dan Penggunaan Teknologi: dapat memfokuskan upaya mereka pada peningkatan efisiensi operasional dan penggunaan teknologi informasi. Ini dapat mencakup penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, otomatisasi proses, dan penggunaan teknologi lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
4. Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi: perlu memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan keuangan. Ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program keuangan.
5. Peningkatan Layanan Publik: dapat fokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang mereka berikan kepada masyarakat. Ini meliputi pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan mudah diakses, serta upaya untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

6. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik: perlu memperkuat pengelolaan risiko dalam kegiatan keuangan mereka. Ini termasuk identifikasi dan evaluasi risiko, pengembangan rencana mitigasi risiko, serta penerapan praktik manajemen risiko yang baik dalam pengambilan keputusan keuangan.
7. Inovasi dan Pengembangan: dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi. Ini melibatkan eksplorasi teknologi baru, pengembangan model bisnis yang inovatif, dan upaya untuk mengadopsi praktik terbaik dalam industri keuangan.

Saran-saran ini bertujuan untuk memberikan panduan umum dalam penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Keuangan. Namun, penting untuk merujuk langsung ke Renstra yang spesifik dan melakukan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi saran yang paling sesuai dengan konteks dan prioritas Kementerian/Lembaga Keuangan tersebut.

isu strategis dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) BPKAD melibatkan proses analisis dan evaluasi terhadap berbagai aspek yang relevan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah metode umum yang digunakan dalam penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu Renstra BPKAD:

1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal: Dilakukan analisis terhadap lingkungan internal BPKAD, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi, kebijakan, dan proses internal. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal yang mencakup faktor politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi kinerja BPKAD.
2. Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan: Melalui analisis, diidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh BPKAD. Ini meliputi kebutuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, tantangan eksternal seperti perubahan kebijakan atau peraturan, serta tantangan internal seperti kekurangan sumber daya manusia atau sistem yang kurang efektif.
3. Prioritisasi Isu-isu: Isu-isu yang diidentifikasi dievaluasi berdasarkan urgensi, dampak, dan keterkaitan dengan tujuan dan visi BPKAD. Isu-isu yang memiliki dampak signifikan dan kepentingan strategis yang tinggi akan diprioritaskan sebagai isu strategis yang harus diatasi dalam Renstra.
4. Penyusunan Tujuan Strategis: Berdasarkan isu-isu yang diprioritaskan, BPKAD akan menyusun tujuan strategis yang akan menjadi fokus dalam Renstra. Tujuan strategis ini bersifat relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan sesuai dengan visi dan misi BPKAD.
5. Penentuan Indikator Kinerja: Untuk setiap tujuan strategis, ditentukan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja harus objektif, terukur, realistis, dan terkait dengan tujuan strategis yang ditetapkan.
6. Penetapan Program dan Kegiatan: Berdasarkan tujuan strategis dan indikator kinerja, BPKAD akan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Program dan kegiatan harus memiliki target, jadwal, dan alokasi sumber daya yang jelas.
7. Monitoring dan Evaluasi: Selama pelaksanaan Renstra, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis dan indikator kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam pelaksanaan Renstra dan pengambilan keputusan strategis berikutnya.

Metode digunakan sebagai panduan umum dalam penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu Renstra BPKAD. Namun, BPKAD dapat memiliki pendekatan yang sedikit berbeda tergantung pada konteks, prioritas, dan kondisi setempat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait dan melakukan analisis yang komprehensif untuk memastikan identifikasi isu dan tujuan strategis yang akurat dan relevan.

Rencana Strategis BPKAD Kota Palangka Raya periode 2024-2026 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya periode 2024-2026 dimana BPKAD Kota Palangka Raya menjadi salah satu SKPD penunjang yang berperan dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sebagaimana Misi Walikota Palangka Raya. Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan, BPKAD Kota Palangka Raya melihat beberapa Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kota Palangka Raya selama beberapa tahun terakhir serta dengan menelaah dokumen perencanaan

beberapa isu strategis BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah):

1. **Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien:** Isu strategis ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Hal ini meliputi penyusunan anggaran yang realistis, pengendalian pengeluaran yang ketat, Penetapan APBD yang tepat waktu, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan penyerapan anggaran, serta pengelolaan utang dan investasi yang bijaksana untuk mencapai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. **Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif:** Isu strategis ini berkaitan dengan pengelolaan aset daerah yang meliputi inventarisasi, pemeliharaan, dan penggunaan yang optimal. Hal ini meliputi upaya untuk memastikan penggunaan dan pemeliharaan aset yang efektif, peningkatan pengawasan terhadap aset, serta penerapan praktik tata kelola aset yang baik tertib Administrasi.
3. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Isu strategis ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi penyediaan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya, penerapan standar akuntansi yang sesuai, pelaporan yang tepat waktu dan lengkap, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.
4. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Isu strategis ini berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini meliputi peningkatan kualitas, keterampilan, dan pengetahuan SDM, pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan, serta perekrutan dan pengelolaan SDM yang baik.
5. **Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Keuangan:** Isu strategis ini berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi keuangan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi

penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi, otomatisasi proses, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengamanan data yang baik.

6. Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi: Isu strategis ini mencakup upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara BPKAD dengan instansi terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan.

Berikut adalah contoh analisis SWOT dari beberapa isu strategis yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien:
 - Strengths (Kekuatan): Kualitas pengelolaan keuangan yang baik, pengendalian pengeluaran yang ketat, pengetahuan dan keterampilan SDM yang baik.
 - Weaknesses (Kelemahan): Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, keterlambatan penyerapan anggaran.
 - Opportunities (Peluang): Peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan, kolaborasi dengan sektor swasta untuk pengembangan proyek investasi.
 - Threats (Ancaman): Perubahan kebijakan fiskal, fluktuasi ekonomi yang tidak terduga, ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah.
2. Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif:
 - Strengths: Inventarisasi aset yang akurat, sistem pemeliharaan yang baik.
 - Weaknesses: Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan aset, keterbatasan dana untuk pemeliharaan aset.
 - Opportunities: Peluang untuk mengoptimalkan penggunaan aset daerah, peningkatan kerjasama dengan sektor swasta untuk pengelolaan aset, pemanfaatan teknologi dalam manajemen aset.
 - Threats: Risiko kerusakan aset karena bencana alam, perubahan regulasi terkait pengelolaan aset.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Strengths: Komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, adanya sistem pelaporan yang sudah ada.
 - Weaknesses: Keterbatasan dalam pengungkapan informasi keuangan, kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pelaporan dan pengawasan.
 - Opportunities: Peluang untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan, kerjasama dengan lembaga eksternal untuk audit dan evaluasi.
 - Threats: Perubahan regulasi terkait pelaporan keuangan, kerugian reputasi karena ketidaktransparan dan kekurangan akuntabilitas.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam BPKAD:
 - a. Strengths (Kekuatan):
 - Adanya komitmen dan motivasi dari manajemen BPKAD untuk meningkatkan kapasitas SDM.
 - Kualitas SDM yang sudah ada, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

- Adanya kebijakan dan program pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- b. Weaknesses (Kelemahan):
- Kurangnya jumlah SDM dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai.
 - Kurangnya dukungan dan anggaran yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan SDM.
 - Tidak adanya program pembinaan dan pengembangan karier yang terstruktur.
- c. Opportunities (Peluang):
- Peluang untuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.
 - Adanya kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh atau pelatihan online.
 - Peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Threats (Ancaman):
- Persaingan dengan sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya dalam merekrut dan mempertahankan SDM berkualitas.
 - Perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi program pelatihan dan pengembangan SDM.
 - Keterbatasan waktu dan sumber daya yang dapat menghambat pelaksanaan program pengembangan SDM.

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil sebagai tindak lanjut dari analisis SWOT tersebut:

- Meningkatkan rekrutmen SDM dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan kualitas yang baik.
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM yang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pelatihan dan pengembangan SDM.
- Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk mendapatkan bantuan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
- Membuat program pembinaan dan pengembangan karier yang terstruktur untuk mendorong pertumbuhan dan motivasi SDM.
- Mengadopsi teknologi informasi dalam pembelajaran dan pelatihan untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan fleksibel.
- Penting untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas SDM ini serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Analisis SWOT ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan terkait isu-isu strategis yang telah disebutkan. Analisis ini dapat membantu BPKAD dalam mengidentifikasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

analisis SWOT terhadap isu-isu strategis yang dihadapi BPKAD, maka dilakukan upaya tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, serta mengambil peluang dan menghadapi ancaman yang ada. upaya tindak lanjut yang dilakukan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien:
 - Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam pengendalian pengeluaran dan penyerapan anggaran.
 - Meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM terkait pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan dan pembinaan.
 - Memanfaatkan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan keuangan.
2. Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif:
 - Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset daerah untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien.
 - Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pemeliharaan aset agar dapat memperpanjang umur pakai dan meminimalkan risiko kerusakan.
 - Mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen aset untuk memantau, melacak, dan mengelola aset dengan lebih efektif.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Memperkuat mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan lengkap.
 - Mengembangkan kebijakan dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan kepada publik.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
 - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SDM di BPKAD. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis gap antara kompetensi yang ada dan yang diharapkan, serta melibatkan input dari manajemen dan pegawai BPKAD.
 - Program Pelatihan dan Pengembangan: Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SDM BPKAD. Program ini dapat meliputi pelatihan internal yang diselenggarakan oleh BPKAD sendiri, kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau pelatihan eksternal, serta partisipasi dalam seminar, workshop, atau konferensi terkait.
 - Pelatihan Berkelanjutan: Menerapkan pendekatan pelatihan berkelanjutan yang melibatkan pelatihan kontinu dan pembinaan karyawan. Dalam hal ini, BPKAD dapat memberikan kesempatan untuk menghadiri kursus atau pelatihan berkala, serta mendorong partisipasi dalam program sertifikasi yang relevan.
 - Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Membangun kerja sama dengan institusi pendidikan, seperti universitas atau politeknik, untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan BPKAD. Ini dapat melibatkan penawaran magang, kerja sama penelitian, atau pendampingan akademik.
 - Program Pengembangan Karier: Membuat program pengembangan karier yang jelas dan terstruktur bagi pegawai BPKAD. Program ini dapat meliputi

rencana pengembangan individu, kesempatan rotasi atau penugasan proyek, serta promosi berdasarkan kinerja dan kompetensi.

- **Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya:** Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk anggaran, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan. Juga penting untuk memastikan aksesibilitas informasi dan teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran dan pengembangan.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang perlu dilakukan, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai.
- **Pembinaan dan Mentoring:** Mengimplementasikan program pembinaan dan mentoring untuk mendukung pengembangan karier dan pembelajaran berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengalaman berbagi, peningkatan keterampilan melalui pendampingan, serta pembinaan yang berkelanjutan dari para senior atau mentor yang berpengalaman.

Setiap upaya tindak lanjut harus disusun dalam rencana kerja yang jelas, dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Penting juga untuk melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan upaya tindak lanjut tersebut. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi upaya tindak lanjut juga perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD terkait isu strategis adalah berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien:

Tujuan: “Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas”

Sasaran: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Tujuan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran: Meningkatkan kualitas dan keteraturan pelaporan keuangan, meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan, serta meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Untuk Mempertahankan predikat WTP berkelanjutan untuk mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) dan mendapatkan predikat pemerintahan dengan tata kelola Keuangan yang baik

Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif:

Tujuan: Meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Sasaran: Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap aset daerah, meningkatkan manajemen inventarisasi aset, serta meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan optimal aset daerah.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM terkait keuangan daerah.

Sasaran: Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang efektif, meningkatkan partisipasi SDM dalam kegiatan pembelajaran, serta meningkatkan kualitas dan jumlah SDM dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan.

4.1.1. Tujuan BPKAD Kota Palangka Raya

“Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah dari Kinerja BPKAD Kota Palangka Raya

Sasaran Jangka Menengah dari kinerja BPKAD sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun		
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	85%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Falsafah Budaya Betang.		
Misi	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):	Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi SDM BPKAD untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah
			Mendorong rekrutmen dan pemilihan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab di BPKAD.
			Menerapkan sistem pembinaan dan mentoring bagi SDM agar dapat terus berkembang dan berkontribusi secara optimal
		Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan proses audit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan daerah.
			Memperkuat sistem pengawasan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
			Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Falsafah Budaya Betang.		
Misi	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keuangan daerah untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman publik.
		Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset	Meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk penguatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi
			Memperkuat pengelolaan aset daerah dengan meningkatkan proses inventarisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset.
			Mengidentifikasi potensi pendapatan baru dan peluang untuk meningkatkan pemanfaatan aset daerah.
		Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengembangkan mekanisme dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akurat.
			Menerapkan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja terkait penetapan APBD tepat waktu dan realisasi anggaran.
			Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara BPKAD dengan SKPD terkait dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
		.Penerapan Teknologi dan Inovasi:	Menerapkan teknologi informasi dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Falsafah Budaya Betang.		
Misi	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
			Mengidentifikasi dan menerapkan inovasi terkini dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan
		Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi	Membangun kemitraan yang kuat dengan pihak terkait, seperti DPRD, SKPD, pihak eksternal, dan masyarakat untuk mendukung upaya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan
			Melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan, BPK, atau pihak lain yang terkait, untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terbaik.
			Implementasi strategi dan kebijakan ini haruslah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini, BPKAD dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan terkait semua data dan isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya

Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang di jalankan tentunya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam urusan pengelolaan keuangan daerah. Semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan suatu hasil yang maksimal dalam hal ini adalah meningkatnya kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dimaksud adalah kedisiplinan dan ketaatan kita dalam melaksanakan dan menjalankan semua aturan perundang-undangan yang menjadi koridor utama atau pedoman wajib dalam menyelesaikan tugas. Apabila hal ini telah dilaksanakan secara menyeluruh maka hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian akan memberikan suatu sumbangan besar dalam mewujudkan visi misi Walikota Palangka Raya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan pengelolaan penganggarnya berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Ditetapkan Tanggal 18 Oktober 2019 Diundangkan Tanggal 12 November 2019 Berlaku Tanggal 01 Januari 2020 Mengubah :Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan Inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya untuk Tahun 2024-2026, maka ditetapkan pula sebanyak 3 (tiga) Program yang terdiri dari 14 (empat belas) Kegiatan dan 131 Sub Kegiatan (seratus tiga puluh satu)

6.1.1. PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.1.2. KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program BPKAD Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026, dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.1.3. SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
17. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
18. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
20. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
21. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
22. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
24. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
25. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
26. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
27. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
28. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
29. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
30. Pemindehan Tugas ASN
31. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
32. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
33. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
34. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

36. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
38. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
39. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40. Penyediaan Bahan/Material
41. Fasilitasi Kunjungan Tamu
42. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
43. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
44. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
45. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
46. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
47. Pengadaan Alat Besar
48. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
49. Pengadaan Mebel
50. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
52. Pengadaan Aset Tak Berwujud
53. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
55. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
57. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
58. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
59. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
61. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
62. Pemeliharaan Mebel
63. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
64. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
65. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
66. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
67. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
68. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
69. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
70. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
71. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
72. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
73. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
74. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
75. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

76. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
77. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
78. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
79. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
80. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
81. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
82. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
83. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
84. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
85. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
86. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
87. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
88. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
89. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
90. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
91. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
92. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
93. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
94. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
95. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
96. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
97. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
98. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
99. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

100. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
101. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
102. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
103. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
104. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
105. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
106. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
107. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
108. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
109. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
110. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
111. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
112. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
113. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
114. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
115. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
116. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
117. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
118. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
119. Penyusunan Standar Harga
120. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
121. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
122. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
123. Penatausahaan Barang Milik Daerah
124. Inventarisasi Barang Milik Daerah
125. Pengamanan Barang Milik Daerah
126. Penilaian Barang Milik Daerah
127. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
128. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
129. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
130. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
131. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya Periode 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					0		0		0		0		0		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Sakip Perangkat Darah 2. Presentase hasil rekomendasi Pengawasan yang ditindak lanjuti 3. Presentase Capaian TKDN belanja OPD	-	1. B 2. 100% 3. 60%	11.453.62 6.583	1. B 2. 100% 3. 60%	11.453.62 6.583	1. B 2. 100% 3. 60%	11.453.62 6.583	1. B 2. 100% 3. 40%	34.360.87 9.749	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.576.100	100 %	84.576.100	100 %	84.576.100	100 %	253.728.300	BPKAD	
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	12.576.100	5 Dokumen	12.576.100	5 Dokumen	12.576.100	5 Dokumen	37.728.300	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	12.000.000	3 Dokumen	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	36.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.152.465.695	100 %	6.152.465.695	100 %	6.152.465.695	100 %	18.457.397.085	BPKAD	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.133.465.695	46 Orang/bulan	6.133.465.695	46 Orang/bulan	6.133.465.695	46 Orang/bulan	18.400.397.085	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			asi Keuangan SKPD												
		5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	21.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	21.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	24.500.000	100 %	24.500.000	100 %	24.500.000	100 %	73.500.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	36 Laporan	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	36 Laporan	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	36 Laporan	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.500.000	36 Dokumen	10.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	482.591.068	100 %	482.591.068	100 %	482.591.068	100 %	1.447.773.204	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	27 Unit	27 Unit	50.357.142	27 Unit	50.357.142	27 Unit	50.357.142	27 Unit	151.071.426	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89 Paket	89 Paket	50.357.142	89 Paket	50.357.142	89 Paket	50.357.142	89 Paket	151.071.426	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	75.535.713	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	25.178.571	1 Dokumen	75.535.713	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	25.178.571	3 Dokumen	25.178.571	3 Dokumen	25.178.571	3 Dokumen	75.535.713	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	44 Orang	100.000.000	44 Orang	100.000.000	44 Orang	100.000.000	44 Orang	300.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	93.852.500	100 Orang	93.852.500	100 Orang	93.852.500	100 Orang	281.557.500	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	112.488.571	100 Orang	112.488.571	100 Orang	112.488.571	100 Orang	337.465.713	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.290.000.000	100 %	1.290.000.000	100 %	1.290.000.000	100 %	3.870.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	45.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	100.000.000	5 Paket	300.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	300.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 Dokumen	100 Dokumen	35.000.000	100 Dokumen	35.000.000	100 Dokumen	35.000.000	300 Dokumen	105.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	Pahandut
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	120.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	800.000.000	300 Laporan	800.000.000	300 Laporan	800.000.000	300 Laporan	2.400.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen	300 Dokumen	50.000.000	300 Dokumen	50.000.000	300 Dokumen	50.000.000	900 Dokumen	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	422.625.600	100 %	422.625.600	100 %	422.625.600	100 %	1.267.876.800	BPKAD	
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	23.500.000	27 Unit	23.500.000	27 Unit	23.500.000	27 Unit	70.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	32.000.000	1 Unit	32.000.000	1 Unit	32.000.000	3 Unit	96.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	100.360.001	1 Unit	100.360.001	1 Unit	100.360.001	3 Unit	301.080.003	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	16.765.599	1 Unit	16.765.599	1 Unit	16.765.599	1 Unit	50.296.797	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	3 Unit	225.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	3 Unit	225.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.383.438.120	100 %	2.383.438.120	100 %	2.383.438.120	100 %	7.150.314.360	BPKAD	
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	262.109.140	3 Laporan	262.109.140	3 Laporan	262.109.140	3 Laporan	786.327.420	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	236.129.500	1 Laporan	236.129.500	1 Laporan	236.129.500	1 Laporan	708.388.500	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.880.199.480	1 Laporan	1.880.199.480	1 Laporan	1.880.199.480	1 Laporan	5.640.598.440	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	613.430.000	100 %	613.430.000	100 %	613.430.000	100 %	1.840.290.000	BPKAD	
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	57.000.000	27 Unit	57.000.000	27 Unit	57.000.000	27 Unit	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	57.000.000	27 Unit	57.000.000	27 Unit	57.000.000	27 Unit	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	57.000.000	1 Unit	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	103.430.000	1 Unit	103.430.000	1 Unit	103.430.000	1 Unit	310.290.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	5 Unit	125.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	375.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi											
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	80 %	80 %	11.541.915.608	85 %	20.230.246.517	85 %	26.138.463.743	85 %	57.910.625.868	BPKAD	BPKAD
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	-	100 %	1.409.313.239	100 %	1.409.313.239	100 %	1.409.313.239	100 %	4.227.939.717	BPKAD	
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	53.592.188	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	53.592.188	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	17.864.063	3 Dokumen	53.592.189	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	306.926.082	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	102.308.694	3 Dokumen	306.926.082	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	144.731.550	2 Dokumen	144.731.550	2 Dokumen	144.731.550	2 Dokumen	434.194.650	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	289.463.100	2 Dokumen	289.463.100	2 Dokumen	289.463.100	2 Dokumen	868.389.300	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	171.575.200	2 Dokumen	171.575.200	2 Dokumen	171.575.200	2 Dokumen	514.725.600	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	442.385.550	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	147.461.850	2 Dokumen	442.385.550	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	129.365.213	2 Dokumen	129.365.213	2 Dokumen	129.365.213	2 Dokumen	388.095.639	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.522.450	2 Dokumen	60.522.450	2 Dokumen	60.522.450	2 Dokumen	181.567.350	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	60.522.450	100 Orang	60.522.450	100 Orang	60.522.450	100 Orang	181.567.350	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Belanja Terhadap APBD	-	100 %	935.376.989	100 %	935.376.989	100 %	935.376.989	100 %	2.806.130.967	BPKAD	
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	117.500.000	1 Dokumen	117.500.000	1 Dokumen	117.500.000	1 Dokumen	352.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan	12 Laporan	117.000.000	12 Laporan	117.000.000	12 Laporan	117.000.000	12 Laporan	351.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	315.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	660.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	84.876.989	1 Dokumen	84.876.989	1 Dokumen	84.876.989	1 Dokumen	254.630.967	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	40.500.000	1 Dokumen	121.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Keuangan Bukan Bank												
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	90.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	75.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.500.000	1 Dokumen	45.500.000	1 Dokumen	45.500.000	1 Dokumen	136.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89 Orang	89 Orang	100.000.000	89 Orang	100.000.000	89 Orang	100.000.000	89 Orang	300.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	-	100 %	714.509.716	100 %	714.509.716	100 %	714.509.716	100 %	2.143.529.148	BPKAD	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	4.447.276	12 Laporan	4.447.276	12 Laporan	4.447.276	12 Laporan	13.341.828	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	130.663.525	1 Dokumen	130.663.525	1 Dokumen	130.663.525	1 Dokumen	391.990.575	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	172.659.263	12 Laporan	172.659.263	12 Laporan	172.659.263	12 Laporan	517.977.789	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	40.834.700	12 Laporan	40.834.700	12 Laporan	40.834.700	12 Laporan	122.504.100	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	53.122.125	1 Dokumen	53.122.125	1 Dokumen	53.122.125	1 Dokumen	159.366.375	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	117.749.064	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	117.749.064	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	56.459.975	1 Dokumen	56.459.975	1 Dokumen	56.459.975	1 Dokumen	169.379.925	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	117.749.064	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	39.249.688	1 Dokumen	117.749.064	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	89 Orang	89 Orang	99.324.100	89 Orang	99.324.100	89 Orang	99.324.100	89 Orang	297.972.300	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pemerintahan Daerah												
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 %	30 %	8.482.715.664	30 %	17.171.046.573	30 %	23.079.263.799	90 %	48.733.026.036	BPKAD	
		5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5.915.029.008	12 Laporan	5.915.029.008	12 Laporan	5.915.029.008	12 Laporan	17.745.087.024	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	246.689.756	12 Laporan	246.689.756	12 Laporan	246.689.756	12 Laporan	740.069.268	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	2.320.996.900	12 Laporan	11.009.327.809	12 Laporan	16.917.545.035	12 Laporan	30.247.869.744	BPKAD	Pahandut
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentasi Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	
		5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Daerah	80 %	80 %	1.150.924.250	85 %	1.150.924.250	85 %	1.150.924.250	85 %	3.452.772.750	BPKAD	BPKAD
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Penyusunan Laporan BMD yang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.150.924.250	100 %	1.150.924.250	100 %	1.150.924.250	100 %	3.452.772.750	BPKAD	
BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD	BPKAD
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	80.500.000	1 Dokumen	80.500.000	1 Dokumen	80.500.000	1 Dokumen	241.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000	1 Dokumen	57.000.000	1 Dokumen	57.000.000	1 Dokumen	171.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000	1 Dokumen	104.000.000	1 Dokumen	104.000.000	1 Dokumen	312.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	210.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	240.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	210.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	465.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	69.124.250	12 Laporan	69.124.250	12 Laporan	69.124.250	12 Laporan	207.372.750	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	128.500.000	1 Dokumen	128.500.000	1 Dokumen	128.500.000	1 Dokumen	385.500.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	78.800.000	12 Laporan	78.800.000	12 Laporan	78.800.000	12 Laporan	236.400.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	150.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	89 Orang	89 Orang	105.000.000	89 Orang	105.000.000	89 Orang	105.000.000	89 Orang	315.000.000	BPKAD	KOTA PALANGKA RAYA
							24.146.466.441		32.834.797.350		38.743.014.576		95.724.278.367		

6.1.4. INDIKATOR KINERJA.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
BPKAD KOTA PALANGKA RAYA

NO	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun0	Tahun1	Tahun2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	80%	85%	85%	-	-	85%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun0	Tahun1	Tahun2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	80%	85%	85%	-	-	85%

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Palangka Raya ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD selama periode 2024 –2026

Renstra BPKAD ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan beberapa tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

Renstra BPKAD merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Tahun 2024-2026, selanjutnya Renstra BPKAD dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang merupakan rencana tahunan, yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan BPKAD merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota Palangka Raya, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palangka Raya



ABSIAH, S.E.

Pembina Tingka I (IV/b)
NIP. 19640308 199011 2 001